

'2023

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, atas izin dan maunah dari-NYA sehingga apa yang kita harapkan yaitu Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diselesaikan meskipun masih terlihat kekurangan di sana sini. Namun ini sudah mewakili perencanaan kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang apa yang kami rencanakan dan apa yang kami harapkan untuk dilaksanakan dan ingin dicapai.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini menyajikan perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan untuk pembangunan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan bidang pariwisata yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja ini mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026, serta tentunya juga tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD 2021 – 2026, maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Untuk penyelesaian penyusunan dokumennya kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, terutama yang telah banyak mencurahkan pikiran dan tenaga sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini telah dibukukan. Untuk kesempurnaannya kami harapkan masukan dan tanggapan konstruktif sehingga dapat menyusun dokumen ini di tahun kedepan lebih baik lagi.

Benteng, 12 Mei 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Drs. Hizbullah Kamaruddin
NIP. 196702261986031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5
B. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	12
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	12
B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13
C. Program dan Kegiatan	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15
BAB V PENUTUP	17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sering disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk satu periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja itu memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- ✚ Persiapan Penyusunan
- ✚ Penyusunan Rancangan Awal
- ✚ Penyusunan Rancangan
- ✚ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- ✚ Perumusan Rancangan Akhir
- ✚ Penetapan

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah di mulai setelah surat edaran Kepala Daerah yang disampaikan oleh Bappelitbangda telah diterima oleh OPD. Perangkat Daerah lalu menyusun rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Kemudian Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal ini kemudian dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Renja Perangkat Daerah tersebut kepada Bappelitbangda untuk di verifikasi. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RKPD. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disempurnakan, disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda. Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara tentang RKPD ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 adalah untuk mendokumentasikan tahapan penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2023 final.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 adalah untuk mensinkronkan Rencana Kerja 2022 sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan mengakomodir usulan Program Kegiatan dari musrenbang Kecamatan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, analisa kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2023, dan Program Kegiatan tahun 2022.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, memuat rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2023 dan kerangka pendanaan untuk mendanai program kegiatan yang mendukung rencana kerja di tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021 – 2026, tahun 2021 merupakan tahun awal disusunnya Renstra tersebut, sehingga tahun 2021 dijadikan sebagai pijakan awal untuk rencana 5 (lima) tahun kedepannya. Sehingga capaian di 2021 masih mengacu ke Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016 – 2021. Target yang ditekankan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016 – 2021 adalah Peningkatan jumlah wisatawan (domestik dan mancanegara) serta realisasi penetapan KEK Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Target Kunjungan wisatawan 2021, untuk wisatawan domestik sebesar 34.283 orang dengan realisasi sementara untuk wisatawan mancanegara sebesar 5.322 orang dengan realisasi

Pencapaian target ini sangat jauh disebabkan oleh target yang ditetapkan sangat tinggi sementara keadaan di 2021 ini masih bergelut masalah COVID-19 dimana untuk pemulihan keadaan dilakukan dengan vaksinasi massal dengan beberapa kali sehingga pada tahun tersebut dilakukan refocusing anggaran.

Begitu juga terkait dengan KEK Pariwisata di Kepulauan Selayar, mengalami kendala terkait penguasaan lahan oleh Konsorsium, setelah dihitung di lapangan ternyata PT. SKL tidak menguasai lahan sepenuhnya seperti yang diusulkan sehingga harus melakukan perbaikan dokumen oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK. Hal ini juga disebabkan munculnya aturan-aturan baru terkait KEK yang harus disesuaikan disebabkan terdapatnya beberapa KEK di luar Selayar

setelah ditetapkan belum membangun dan beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Capaian target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan erat dengan realisasi program / kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021. Realisasi fisik pelaksanaan program kegiatan sub kegiatan pada tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 7.877.655.103 dari pagu Rp. 8.098.835.400,- .

Sub kegiatan dari Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang cukup potensial untuk mendukung pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

- ✚ Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- ✚ Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- ✚ Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota
- ✚ Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub kegiatan dari program pemasaran pariwisata yang cukup potensial untuk mendukung penapaian target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri

Sub kegiatan dari program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

- ✚ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- ✚ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Selain urusan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mengatur urusan Kebudayaan. Program Kebudayaan ini terdiri dari 4 program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Permuseuman. Sub Kegiatan yang mendukung dari program-program kebudayaan ini adalah :

- ❖ Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
- ❖ Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- ❖ Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
- ❖ Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

Kebijakan/ tindakan yang perlu diambil agar program kegiatan yang dilakukan berhasil baik dari segi keluaran maupun hasil adalah sebagai berikut :

1. Orientasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mengacu kepada hasil sehingga setiap kegiatan bukan Cuma menggugurkan kewajiban melainkan tanggung jawab terhadap hasil yang diharapkan. Setiap kegiatan harus ditindaklanjuti, bukan selesai kegiatan dan sub kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan lalu dibiarkan stagnan. Sebaiknya aktivitas yang telah dilaksanakan betul-betul sesuai yang direncanakan dan mendukung target-target yang ingin dicapai. Sehingga apa yang telah dibangun dari tahun sebelumnya dapat dilanjutkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat.
2. Terkhusus untuk program kegiatan pada urusan pariwisata, perlu dilakukan pemusatan daya dan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas, sehingga aktivitas ini bisa meningkatkan target kinerja seperti pembangunan destinasi, penyiapan sdm pariwisata, dan

pelaksanaan promosi dan event, semua ini harus menghasilkan outcome yaitu peningkatan PAD di sektor pariwisata.

3. Peluang yang telah terbuka dengan sudah dilonggarkannya PPKM di 2022. Ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi dari target-target. Seperti pelaksanaan event pariwisata sudah bisa dilaksanakan, destinasi sudah dibuka dimana-mana. Dan aktivitas bisnis sudah mulai jalan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pelayanan yang berkaitan dengan urusan pariwisata berupa pelayanan terkait penyiapan destinasi pariwisata, fasilitasi perizinan usaha pariwisata, penyiapan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemasaran pariwisata. Pelayanan ini bermuara pada peningkatan PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang otomatis meningkatkan PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Namun untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata bukan hanya melihat dari PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata karena pariwisata dampaknya multiplayer efek. Pariwisata langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata. Indikator yang sering digunakan selain kenaikan PAD adalah juga jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Semakin tinggi jumlah wisatawan diharapkan makin banyak uang beredar di masyarakat karena aktivitas wisatawan. Namun di tahun 2023 ini diharapkan aktivitas pariwisata semakin tinggi seiring berlalunya pandemi covid 19 di Indonesia.

Terkait kebudayaan, diharapkan warisan budaya tak benda dan cagar budaya peninggalan masa lampau dapat memberikan pengalaman dan pelajaran dari kehidupan masyarakat selayar masa lampau. Sehingga warisan budaya yang masih bisa digunakan di masa sekarang dan mendukung pembangunan di Kepulauan Selayar dapat

dilestarikan dan dikembangkan. Cagar budaya yang ada dapat menjadi bukti otentik sejarah masa lampau dan dapat diteliti, dipelajari dan dijadikan aset museum. Cagar budaya ini juga dapat bersinergi dengan urusan pariwisata dengan banyaknya wisatawan yang berminat mengunjungi tempat wisata budaya dan sejarah suatu daerah.

Untuk lebih lengkapnya target-target yang akan dicapai dalam kurun 5 tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran II.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sesuai tema Renstra Disparbud dan RPJMD Kab. Kepulauan Selayar yang ingin mewujudkan “Bandar Maritim” kawasan Timur Indonesia, menimbulkan isu-isu strategis dalam mewujudkannya. Pemanfaatan laut sebagai bagian dari wilayah kepulauan selayar yang terluas dibanding daratan perlu dimanfaatkan dengan maksimal. Wisatawan minat khusus seperti selam dan snorkling menjadi target utama dalam menggenjot peningkatan perekonomian di sektor Pariwisata. Selain itu, dengan lautnya, Kepulauan Selayar dapat menjadi jalur penghubung utama daerah-daerah di Indonesia bagian timur dikarenakan Selayar berada di jantung kawasan timur Indonesia. Belum lagi Taman Nasional Taka Bonerate yang sangat mendunia, terdapat di Kepulauan selayar yang menjadi daerah konservasi tanaman dan hewan laut Indonesia bahkan dunia.

Terkait kebudayaan, di masa lampu Kepulauan selayar sering dilayari oleh pelaut-pelaut asing dan tak sedikit terjadi peperangan di laut akibat perebutan sumber rempah-rempah. Dengan banyaknya ditemukan BMKT di Kepulauan Selayar bahkan ada yang telah menjadi ritus yaitu ritus sangkulu-kulu menjadi bukti bahwa potensi BMKT di selayar sangat menjanjikan.

Dari potensi yang digambarkan di atas, maka pengembangan kawasan berwisata apakah itu berupa KEK Pariwisata atau kawasan lainnya sangat menjanjikan untuk menarik investor di sektor pariwisata. Apalagi didukung dengan kekayaan budaya dan benda-

benda peninggalannya yang juga menjadi daya tarik tersendiri di banding daerah lain.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD yang juga merupakan perencanaan awal program kegiatan sub kegiatan di Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah rancangan yang disusun di awal periode pengusulan program kegiatan sub kegiatan setiap tahunnya.

Olehnya itu, setiap bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemetaan kebutuhan yang diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan urusan pariwisata dan urusan kebudayaan kedepannya. Rancangan awal RKPD itu mungkin jadi masih relevan untuk dilanjutkan namun ada juga rancangan awal RKPD yang perlu di perbaiki target dan sasarannya bahkan perlu diganti dengan kegiatan sub kegiatan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis dari bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian dituangkan ke dalam tabel yang terdapat pada lampiran III Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

Ada beberapa program kegiatan yang diprioritaskan, yaitu :

- a. Program pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatannya lebih diutamakan untuk penyiapan dokumen perencanaan daya tarik dan destinasi wisata di Kepulauan Selayar.
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, kegiatannya diprioritaskan berupa pelaksanaan event wisata FTB untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ditujukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sektor pariwisata untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Selayar.
- d. Program Pengembangan Kebudayaan, ditujukan untuk menyempurnakan PPKD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai data base kebudayaan dan cagar budaya.

- e. Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya , ditujukan untuk menemukan dan melestarikan peninggalan sejarah berupa cagar budaya yang belum sempat terdata selama ini.
- f. Program Permuseuman, untuk mendukung Program pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam memberikan ruang dan tempat untuk dikelola, dipelihara dan direvitalisasi serta dijadikan sarana pembelajaran masyarakat di Kepulauan Selayar.
- g.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Ada beberapa usulan program kegiatan yang telah disampaikan baik itu melalui forum OPD yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Untuk bisa diakomodir menjadi program kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA/ DPA Dinas Pariwisata dan Kabupaten harus memenuhi syarat diantaranya, kesiapan lahan pemerintah/ dikuasai pemerintah untuk pengembangan destinasi pariwisata, kesamaan visi dan misi serta sasaran dan target Disparbud yang sesuai dalam dokumen Renstra Disparbud. Dan yang lebih penting adalah ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

Usulan program kegiatan ini bisa berasal dari pemerintah kecamatan, atau dari kelompok masyarakat, LSM dan Perangkat Daerah lainnya. Usulan ini diinput ke dalam SIPD sebagai aplikasi perencanaan terbaru dan terpadu seluruh Indonesia. Usulan yang ditujukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada Lampiran IV dokumen ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transformasi energi ini respons terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, dan terakhir adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pariwisata mendukung Prioritas Nasional 1, 3, dan 5, sementara Kebudayaan mendukung Prioritas Nasional 4. Diharapkan dengan dukungan ini, Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan suntikan anggaran dari pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Tujuan 1 meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dengan sasaran mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
2. Tujuan 2 meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dengan sasaran meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.
3. Tujuan 3 meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sasaran 1 meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan sasaran 2 meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

C. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program yang terdapat dalam urusan pemerintahan sektor pariwisata dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Pemasaran Pariwisata
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Pengembangan Kebudayaan

7. Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Pembinaan Sejarah
9. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10. Pengelolaan Permuseuman.

Untuk melihat program, kegiatan dan sub kegiatan yang terpilih beserta pagu yang direncanakan untuk diusulkan di tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran V Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan destinasi yang sudah terkelola serta pembenahan destinasi dengan penambahan berbagai fasilitas pariwisata di dalamnya. Fokus berikutnya adalah penyiapan tenaga kerja pariwisata yang memiliki skill dan mampu melayani wisatawan sesuai standar prosedur yang berlaku. Melaksanakan event nasional sebagai usulan menjadi kharisma event dan juga menjadikan event Festival Taka Bonerate sebagai event tahunan setelah pernah tidak dilaksanakan selama Pandemi Covid-19.

Pada ketiga rencana kerja di atas dilakukan melalui :

- a. Memaksimalkan anggaran dari pusat baik melalui APBN langsung, anggaran provinsi maupun dari DAK Fisik dan Non Fisik 2023.
- b. Melakukan kerja sama pengelolaan destinasi dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan dapat memberikan pemasukan lebih PAD kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Mencari atau menggali daya tarik yang dapat diangkat dan dirubah statusnya menjadi destinasi baru sebagai alternatif berwisata di Kepulauan Selayar.
- d. Melakukan inventarisasi event-event pendukung dan lokasi pelaksanaan yang mungkin bisa menjadi alternatif model bagi event Festival Taka Bonerate.

Untuk urusan Kebudayaan, juga dilakukan berupa rencana kerja yakni memaksimalkan kegiatan-kegiatan di Museum untuk masyarakat dan pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan. Untuk itu maka dilakukan melalui :

- a. Melaksanakan pemutakhiran PPKD, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan anggaran DAK Kebudayaan kedepannya karena PPKD yang

lengkap menjadi persyaratan mutlak keberadaannya untuk mendapatkan anggaran.

- b. Melakukan inventarisasi dan pelestarian budaya melalui pendaftaran Objek Pemajuan Kebudayaan di Tingkat Nasional.

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan anggaran dan rencana kerja Tahun 2023 , ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 2023 dimana diperlukan rincian kegiatan yang akan di input dalam aplikasi SIPD. Diharapkan agar sudah tersedia Standar biayanya yang akan diusulkan ke BPKPD Bidang Asset sehingga penginputan SIPD dapat dilakukan lebih cepat dan terencana baik.

Paradigma bergesernya IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Selayar dan ditetapkannya KEK Pariwisata menjadi Peningkatan PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD kabupaten adalah untuk lebih memperlihatkan bahwa Sektor Pariwisata yang dianggap hanya memboroskan anggaran ternyata menjadi penyumbang PAD terbesar bagi Kepulauan Selayar. Semoga perbaikan ini akan membawa dampak bagi kemajuan pariwisata dan kebudayaan di Kepulauan Selayar terutama terkait penganggaran Program Kegiatan Sub Kegiatan yang selama ini masih jauh dari cukup.

Benteng, 11 Mei 2022

**Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan,**

Drs. Hizbullah Kamaruddin

NIP. 196702261986031003